

**POTENSI PENYELUNDUPAN HUKUM MELALUI PERMOHONAN
PERUBAHAN IDENTITAS OLEH KELOMPOK LGBTQ+
BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NOMOR 874/PDT.P/2023
PENGADILAN NEGERI DENPASAR**

Oleh

Putu Nirmala Pridayanti, NIM 2114101125

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penetapan Nomor 874/Pdt. P/2023 oleh Pengadilan Negeri Denpasar mencerminkan komitmen peradilan akan keadilan bagi kelompok minoritas yaitu LGBTQ+, di sisi lain penetapan ini juga menimbulkan kekhawatiran akan adanya potensi penyelundupan hukum oleh kelompok LGBTQ+. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan (1) untuk mengetahui dan mengkaji bentuk potensi penyelundupan terhadap penetapan hukum oleh kelompok LGBTQ+ berdasarkan hasil penetapan permohonan perubahan identitas di Pengadilan Negeri Denpasar serta (2) untuk mengetahui dan mengkaji upaya yang dapat dilakukan untuk bersama – sama mencegah penyelundupan hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang – undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai dasar analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Terdapat celah hukum terkait perubahan identitas gender serta ambiguitas dalam Pasal 56 UU No. 1 Tahun 1974 dapat berisiko disalahgunakan, khususnya dalam konteks pernikahan sesama jenis. Hal ini berpotensi menggoyahkan integritas sistem hukum Indonesia. Kemudian, (2) Indonesia tidak mengakui perkawinan sesama jenis, bahkan setelah prosedur operasi penggantian kelamin, sesuai dengan UU Perkawinan 1974 dan norma-norma agama. Hal ini berbeda dengan kebijakan di negara – negara seperti Belanda dan Jerman yang mengakui perkawinan tersebut. Maka perlu adanya regulasi yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut guna memberikan keadilan baik bagi masyarakat maupun kelompok minoritas yaitu kelompok LGBTQ+.

Kata Kunci : Penyelundupan Hukum, Permohonan Perubahan Identitas, Kelompok LGBTQ+

***POTENTIAL EVOTION OF THE LAW THROUGH IDENTITY CHANGE
REQUESTS BY LGBTQ+ GROUPS BASED ON COURT ORDER NUMBER
874/PDT.P/2023 DENPASAR DISTRICT COURT***

By

Putu Nirmala Pridayanti, NIM 2114101125

Legal Studies Program

ABSTRACT

Determination Number 874/Pdt. P/2023 by Denpasar District Court reflects the judiciary's commitment to justice for minority groups, namely LGBTQ+, on the other hand this determination also raises concerns about the potential for legal smuggling by LGBTQ+ groups. This study was conducted with the aim of (1) to know and examine the form of potential smuggling of legal determination by LGBTQ+ groups based on the results of the determination of the application for identity change in Denpasar District Court and (2) to know and examine the efforts that can be made to jointly prevent legal smuggling. This research uses normative legal research, with a statute approach, conceptual approach, case approach and comparative approach. The legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials as the basis for analysis. The results of the study show that (1) There are legal loopholes related to changes in gender identity and the ambiguity in Article 56 of Law No. 1 of 1974 can be at risk of misuse, especially in the context of same-sex marriage. This has the potential to undermine the integrity of the Indonesian legal system. Furthermore, (2) Indonesia does not recognize same-sex marriages, even after gender reassignment surgery procedures, in accordance with the 1974 Marriage Law and religious norms. This is in contrast to policies in countries such as the Netherlands and Germany that recognize such marriages. Therefore, there is a need for regulations that can solve these problems in order to provide justice for both society and minority groups, namely the LGBTQ+.

Keywords : Evotion of the Law, Identity Change Requests, LGBTQ+ People